

BAB III

ISU ANTI-IMIGRAN DI PERANCIS

Pada bab yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai sistem pemerintahan dan politik Perancis, oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya adalah penjelasan mengenai isu anti-imigran di Perancis; sejarah dan perkembangannya, serta profil Emmanuel Macron dan pembahasan tentang kemenangannya di tengah hiruk pikuk gelombang penolakan terhadap imigran di Perancis. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsep imigran telah memberikan pengaruh yang cukup besar di Perancis, kemudian munculnya isu anti imigran sebagai dampak dari besarnya arus kedatangan imigran ke Perancis, yang kemudian menjadi *exogenous shock* di setiap proses kampanye; selama periode Pemilihan Presiden mulai diselenggarakan, dapat dimanfaatkan oleh setiap aktor politik dalam upayanya mempengaruhi perilaku pemilih untuk memberikan suara kepada aktor politik tersebut pada saat pemilihan umum tiba, termasuk Emmanuel Macron.

Menurut Le Haut Conseil d'Integration⁴¹, imigran adalah orang yang lahir di luar teritori Perancis dan masuk ke wilayah Perancis dengan niat untuk tinggal dan menetap dalam teritori Perancis dalam waktu yang lama. Imigran dapat menjadi warga negara Perancis dengan cara naturalisasi.⁴²

Sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang masalah, Airin Miranda menuturkan dalam jurnalnya yang berjudul Masalah integrasi di Perancis, fenomena imigran

⁴¹Le Haut Conseil d'Intégration adalah instansi pemerintah Perancis yang mengurus dan memberikan pendapat, atas permintaan Perdana Menteri atau Kabinet, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan integrasi warga asing dan/atau imigran.

<http://www.premier-ministre.gouv.fr>

⁴² Miranda, *Op. Cit.*, Hlm. 11

adalah aspek penting dalam sejarah Perancis kontemporer. Dimulai dengan kedatangan imigran yang berasal dari negara-negara tetangga di Eropa, hingga mereka yang berasal dari negara-negara di benua Afrika dan Asia, Perancis mengenal beberapa gelombang kedatangan imigran. Masuknya imigran ke Perancis dilatarbelakangi berbagai motif, terutama ekonomi. Hal ini berkaitan dengan kondisi demografis Perancis dan juga tuntutan suplai tenaga kerja menyusul adanya industrialisasi di Perancis pasca Perang Dunia II.

Dijelaskan pula bagaimana Perancis sebagai negara tujuan migrasi, terhitung lambat menyadari dan menyikapi keberadaan imigran di negaranya. Masalah mengenai imigran sendiri baru mulai dibicarakan dalam debat politik sekitar tahun 80'an. Selain itu, keberadaan imigran juga hanya dibahas dalam studi demografi, sebelum akhirnya muncul studi yang lebih spesifik meneliti dampak sosial dan politik dari imigran di Perancis, yaitu sosiologi migrasi. Keterlambatan pemerintah Perancis dalam mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dengan adanya imigran di negaranya menyebabkan suasana yang tidak kondusif dalam kehidupan bermasyarakat antara pendatang dan warga asli.⁴³

A. Isu Imigran di Perancis

Istilah “masalah imigran” muncul seiring kedatangan dalam jumlah besar imigran dari negara-negara bekas jajahan Perancis pasca PD II. Padahal sebelumnya Perancis sudah menerima kedatangan imigran dari berbagai negara yang berbatasan dengannya. Kedatangan imigran pada masa pasca PD II tersebut membawa dampak sosial yang lebih besar dari kedatangan imigran sebelumnya karena adanya perbedaan budaya dan latar belakang sejarah yang terlalu jauh antara para imigran tersebut dengan masyarakat Perancis, yang dipercaya oleh banyak pihak sebagai sebab

⁴³ Miranda, *Ibid.*, Hlm. 1

dari gagalnya usaha pembauran antara pendatang dan warga asli di Perancis.

Kejadian pada bulan November 2005 kemarin menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan di kalangan imigran dan anak-anak keturunan imigran mengenai situasi kehidupan mereka sebagai warga negara Perancis yang tidak sama dengan orang Perancis asli. Seiring berjalannya waktu, keberadaan imigran di Perancis tidak lagi hanya terpusat pada fungsi ekonomi mereka sebagai tenaga kerja murah yang mendukung industrialisasi di Perancis, tetapi juga menyinggung pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas dan permasalahan ras di dalamnya.⁴⁴

Miranda juga menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa imigran di Perancis, yang merupakan warga minoritas, tidak seketika mendapatkan status yang jelas mengenai keberadaan mereka di Perancis. Pada awal kedatangannya, imigran adalah sekelompok orang yang berfungsi sebagai pengisi kebutuhan akan tenaga kerja menyusul adanya industrialisasi dan perbaikan ekonomi di Perancis. Selain itu, situasi demografis Perancis yang mengalami stagnasi juga terbantu dengan adanya kedatangan para imigran tersebut.

Tak bisa dipungkiri pula krisis yang terjadi dari negara asal imigran juga menjadi latar belakang kedatangan mereka ke tanah Perancis. Perancis dikenal sebagai negara yang cukup terbuka menerima pendatang dengan tujuan meminta suaka hukum karena situasi negara asal mereka yang tidak aman, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Eropa Timur. Perancis menebarkan harum kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang. Ditambah lagi dengan reputasinya sebagai negara yang melahirkan banyak pemikir yang terkenal di seluruh dunia, Perancis menjadi sebuah negara impian yang terletak cukup dekat dibandingkan tanah Amerika yang berada di seberang Samudera Atlantik. Hal-hal seperti itulah yang membuat Perancis menjadi negara

⁴⁴ Miranda, *Ibid.* Hlm. 2.

tujuan migrasi yang cukup populer, terutama bagi negara-negara tetangganya di Eropa.

Miranda memaparkan bahwa fenomena yang disebut sebagai masalah imigran sebenarnya adalah masalah-masalah sosial seperti tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain, dan status kewarganegaraan mereka. Status kewarganegaraan itu lah yang terutama akhirnya berujung pada masalah yang lebih besar, yaitu aksi rasisme. Dewasa ini, keberadaan imigran menjadi topik diskusi yang hangat dibicarakan. Dari forum-forum tersebutlah penyebutan ini muncul. Sehingga dapat dikatakan bahwa imigran selalu diasosiasikan dengan kata masalah. Bukan hanya bagi para imigran, namun juga bagi keturunannya yang telah lahir dan mengenyam pendidikan di Perancis. Bahkan aksi rasisme di berbagai aspek kehidupan yang dialami oleh seorang imigran dan/atau keturunannya juga disebut sebagai masalah imigran.

Permasalahan seperti rendahnya pendidikan, rawannya keamanan di daerah tempat tinggal imigran, dan kemiskinan merupakan hal-hal yang juga termasuk dalam kategori masalah imigran. Terlihat bahwa walaupun di satu sisi keberadaan imigran dibutuhkan untuk mengisi sektor-sektor pekerjaan tertentu atau untuk memperbaiki situasi demografis Perancis, namun di sisi lain segala permasalahan sosial yang muncul sebagai dampak logis proses migrasi sepenuhnya dibebankan kepada para imigran.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan keberadaan imigran, salah satu yang terbesar pernah dipaparkan Gunaryadi dalam artikelnya yang dimuat dalam *Koran Republika*⁴⁵ menjelaskan bahwa kerusuhan tahun 2005 yang bermula di Clichy-sous-Bois, dekat Paris, tidak dimulai tanggal 27 Oktober 2005. Prolog ke arah sana sudah berlangsung dalam beberapa dekade. Gejolak di kawasan pinggiran (banlieue) semacam itu pernah pula terjadi pada

⁴⁵ Gunaryadi. 2005. *Kerusuhan Prancis dan Ekseunya, Opini Harian edisi 10 November 2005*. Jakarta: Koran Republika.

masa Presiden Francois Mitterand, tahun 1990. Tetapi apa yang terjadi dalam dua pekan tersebut adalah protes berupa kekerasan dalam skala luas dan lebih lama.

Hingga 8 November 2005, kerusuhan yang terjadi di lebih dari 200 kawasan di seluruh Perancis itu telah memakan satu korban jiwa, lebih dari 5.900 kendaraan dibakar, dan 1.500 orang ditahan. Selain terhadap kendaraan, kebakaran juga menimpa gedung sekolah, tempat ibadah, kantor polisi, toko, pusat olahraga, rumah sakit, dan lain-lain.

Dari segi kerusakan materil, kerusuhan ini merupakan yang terburuk menimpa Perancis sejak Perang Dunia II. Ada kekhawatiran pula, kerusuhan serupa bisa menjangar ke negara lain di Eropa yang juga memiliki kawasan *banlieuesi*. Sejak 9 November 2005, jam malam diberlakukan berdasarkan Undang-undang Darurat yang dibuat tahun 1955, sebuah produk hukum untuk menindas perlawanan rakyat Aljazair ketika menuntut kemerdekaan dari Peancis (1954-1962).⁴⁶

Mengangkat isu imigran di dalam aktivitas kampanye kerap dilakukan oleh aktor politik di Perancis, hal ini dikarenakan besarnya concern masyarakat terhadap kehadiran imigran. Pada dasarnya, masyarakat Perancis terbagi menjadi dua kubu sejak terpilihnya Marine Le Pen dan Emmanuel Macron dikarenakan perbedaan program yang mereka tawarkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Macron merupakan kandidat yang secara tegas berpihak kepada globalisasi dan integrasi dengan Uni Eropa, sedangkan Marine Le Pen bersikap sebaliknya.

Penolakan terhadap imigran yang disampaikan oleh Marine Le Pen dalam debat Calon Presiden 2017 ini, secara tidak langsung menunjukkan kekhawatiran sebagian masyarakat Perancis, yang notabene adalah pendukungnya, terhadap kehadiran imigran, baik yang masuk ke Perancis secara legal maupun illegal. Dalam kampanyenya Le Pen

⁴⁶ Gunaryadi, *Ibid.*

seringkali mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai isu imigran, sebagaimana yang dikutip BBC, dalam menanggapi permasalahan imigran yang masuk ke Perancis, Le Pen menyebutkan bahwa ia akan menghentikan situasi gila dan tak terkendali itu, dan ia akan memulainya dengan memorandum kedatangan imigran legal ini tujuannya demi menghentikan hiruk-pikuk yang terjadi, menurutnya situasi tak terkendali ini sudah menyeret Perancis ke jurang.⁴⁷

Selain mengalami penolakan dari pihak elit Perancis, imigran di Perancis juga mengalami penolakan oleh rakyat Perancis secara langsung. Pada tahun 2009, tiga warga Afganistan dari Perancis dipulangkan ke negara mereka, setelah kamp migran di Calais ditutup. Tempat tersebut merupakan lokasi para imigran dan pengungsi berkumpul dengan harapan dapat melintasi selat tersebut menuju ke Inggris.⁴⁸

Pada tahun 2016, ribuan warga Kota Pierrefeu Du Var, Prancis melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan para migran yang tersebar di Prancis. Warga khawatir migran akan mengancam keamanan kawasan tersebut. Pemerintah Prancis akhirnya membongkar kamp “hutan” di Calais setelah berbagai aksi protes, termasuk kasus setelahnya adalah pembakaran blok toilet dan polisi pun dihujani batu oleh imigran yang marah. Polisi bersenjata disebar di sekitar kamp pengungsi tersebut guna memastikan keamanan pada saat pembongkaran kamp “hutan” dimulai.⁴⁹

⁴⁷ Tuwo, Andreas. 2017. *Capres Le Pen Berjanji Hentikan Imigran Masuk ke Prancis*. Liputan6.com, diakses 1 Januari 2018. (dapat diakses pada: <http://global.liputan6.com/read/2924580/capres-le-pen-berjanji-hentikan-imigran-masuk-ke-prancis>)

⁴⁸ Kompas. 2009. *Perancis Usir Imigran Afganistan*. Diakses 2 Januari 2018. (dapat diakses pada: <http://internasional.kompas.com/read/2009/12/16/05165322/perancis.usir.imigran.afganistan>)

⁴⁹ Tribunnews.com. 2016. *Kamp Imigran di Calais Perancis Dibongkar, Bagaimana Nasib 6.500 Pengungsi Disana?.* Diakses 2

Singkatnya, Perancis didatangi imigran semenjak revolusi Industri pasca Perang Dunia II. Kedatangan imigran sendiri dilatarbelakangi oleh banyak faktor selain ekonomi, akan tetapi Perancis cukup terlambat dalam menyadari kedatangan para imigran dan menjadikannya sebagai bahan diskusi dan kajian pada tahun 80'an.

Pada awalnya kedatangan imigran di Perancis belum mendapatkan perhatian besar, sampai akhirnya terjadi kegagalan integrasi warga negara Perancis dengan para imigran tersebut. Pemerintah Perancis sendiri telah mengupayakan berbagai cara untuk menangani kehadiran para imigran, baik yang mengusahakan adanya integrasi maupun upaya untuk menekan jumlah imigran di Perancis.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Perancis, diskriminasi terhadap imigran kerap terjadi dikarenakan kekhawatiran warga negara Perancis terhadap imigran yang mereka anggap tidak berbaur dan berupaya untuk mendapatkan pengakuan. Terlebih lagi dengan adanya serangan teroris yang meningkatkan ketakutan terhadap orang asing semakin memperkeruh suasana di antara kedua pihak. Hal ini menjadikan kedatangan imigran menjadi "masalah imigran", oleh karena itu, isu ini acap kali diangkat oleh aktor politik dalam setiap kegiatan kampanye guna memperoleh dukungan dari warga negara Perancis yang memiliki pandangan serupa.

B. Imigrasi dan Politik

Sementara angka-angka tidak mengarah kepada krisis migrasi di Perancis, isu ini tetap saja mengalami politisasi, dan dalam jangka waktu yang lebih lama, apabila dibandingkan dengan di tempat lain di Eropa. Fitur sistem politik Perancis membantu menjelaskan perhatian politik

Januari 2018. (dapat diakses pada:

<http://batam.tribunnews.com/2016/10/24/kamp-imigran-di-calais-perancis-dibongkar-bagaimana-nasib-6500-pengungsi-disana?page=all>)

ini. Pertama, undang-undang pemilihan umum di Perancis telah mendorong fokus kepada imigrasi. Tidak seperti sistem partai multi-polar di negara-negara Benua Eropa lainnya, yang mendorong koalisi kompleks di berbagai bidang kebijakan, sistem pemilihan Perancis dimana *winner-take-all* telah menyebabkan pihak kiri dan kanan membesar-besarkan perbedaan partisan. Karena kebijakan makroekonomi dan industri tidak lagi menjadi pertanyaan politik yang memecah belah Perancis – terutama dengan pembalikan kebijakan 1983 terhadap Partai Sosialis arahan Francois Mitterand- politik kiri dan kanan memanfaatkan isu-isu sosial baru seperti halnya imigrasi. Setelah kampanye pemilihan nasional berturut-turut (legislatif dan presiden) di mana setiap pemerintahan baru berupaya membatalkan undang-undang sebelumnya.

Perdebatan politik berkembang dari waktu ke waktu untuk mengikutsertakan peran imigrasi dalam isu-isu seperti identitas nasional, inkorporasi migran, keamanan, dan terorisme. Mobilisasi kedua pasukan pro dan anti migran telah memberi makan api politik. Perancis adalah satu-satunya negara yang menyaksikan gerakan sosial migran berskala besar.

Kontra-mobilisasi oleh ekstrimis sayap kanan juga memberi makan debat politik tentang imigrasi. Hal ini telah mendorong politisi utama terkemuka untuk berhak menangani masalah imigrasi, agar dapat memenangkan kembali pemilih dari tingkat yang paling kanan, atau menyebabkan partai-partai yang bersaing kehilangan suara karena partai *Front National*.

Pada awal 1990-an, meskipun imigrasi di semua kategori masukan hukum telah jatuh, partai *Front National* kanan Jean-Marie Le Pen menarik sebagian besar pemilih dengan tuntutan demagogis untuk mengusir imigran Muslim di Perancis. Politisi di seluruh spektrum politik menanggapi dengan argumen mendukung '*immigration zero*', dan koalisi sayap kanan yang mulai berkuasa pada

tahun 1993 mengartikan prinsip immigration zero ke dalam bentuk kebijakan.

Hukum Pasqua tahun 1993, yang dinamai menurut Menteri dalam Negeri Perancis, Charles Pasqua, berusaha menghentikan arus imigran legal yang tersisa dengan berbagai cara; dengan melarang lulusan asing menerima tawaran pekerjaan dari pengusaha Perancis, dan menolak memberikan status tempat tinggal yang stabil, dengan meningkatkan masa tunggu bagi reunifikasi keluarga dari satu hingga dua tahun lebih lama, serta dengan menolak izin tinggal kepada pasangan imigran yang secara illegal telah tinggal di negara tersebut sebelum menikah.

C. Kebijakan Imigrasi Pasca Perang

Dirujuk dari artikel oleh Guiraudon yang berjudul *Immigration Policy in France*,⁵⁰ dijelaskan bahwa dalam periode pasca perang, Perancis adalah satu-satunya negara yang mendorong adanya imigrasi permanen. Dalam hal ini, kebijakannya dapat disebut mirip dengan Amerika Serikat. Namun, sebagaimana yang terjadi di kawasan Eropa Barat, perekrutan pekerja baru di Perancis dihentikan oleh peristiwa *oil shock* pada tahun 1973. Di bawah kepemimpinan konservatif, Valery Giscard d'Estaing, muncul upaya untuk memutarbalikkan arus imigran dengan menolak perpanjangan izin tempat tinggal mereka.

Proyek-proyek ini gagal, terutama karena administrasi Publik Perancis menggunakan cara-cara prosedural untuk memblokir mereka. Sejak 1973, kebijakan imigrasi di Perancis berfokus utama kepada upaya membendung dan menghalangi migrasi. Hal ini bertolak belakang dengan Amerika Serikat, yang menyambut banyak tenaga kerja dan imigran keluarga. Terlebih lagi, Amerika Serikat mengatur

⁵⁰ Guiraudon, Virginie. *Immigration Policy in France*. 2001. (Dapat diakses pada <https://www.brookings.edu/articles/immigration-policy-in-france/>)

kepentingan bisnis dan etnis secara terorganisir untuk melobi undang-undang imigrasi yang ekspansif, dalam hal ini Perancis tidak memilikinya.

Selain itu, restrukturisasi sosio-ekonomi dan kemerosotan ekonomi sejak tahun 1970-an menunjukkan bahwa pengusaha di Perancis tidak membutuhkan tenaga kerja asing yang legal, sementara tingkat pengangguran yang tinggi memberikan sentimen *xenophobia* dalam opini publik dan retorika populis.

Perancis tetap menerima imigran legal, dengan sekitar 100.000 entri baru per tahunnya. Arus legal ini termasuk dengan para migran Uni Eropa yang menikmati hak gerakan bebas (*schengen*), anggota keluarga dari penduduk legal, yang haknya dilindungi oleh undang-undang kependudukan, dan para pengungsi serta pencari suaka yang diakui secara konstitusional dan hukum internasional.

Conseil d'Etat dari Perancis, pengadilan administratif tertinggi, sejak akhir 1970-an telah memainkan peran penting dalam membela kelompok-kelompok ini. Seiring dengan penerus pemerintahan yang berusaha membendung arus migrasi dan mengeluarkan lebih banyak perintah pengusiran, pengadilan tinggi Perancis telah memasuki keributan politik imigrasi.

Kelompok bantuan hukum seperti 'Kelompok untuk Menginformasikan dan Mendukung Pekerja Imigran' telah membantu pengadilan dalam upaya ini. Bersama-sama, pengadilan dan Conseil d'Etat telah sangat membatasi diskresi negara dalam bidang pengendalian migrasi.

Berdasarkan pada sensus Perancis yang diterbitkan pada bulan Maret 1999, menunjukkan bahwa terdapat 3.263.000 orang asing di Perancis (5,6% dari total populasi). Angka ini mewakili penurunan 9% populasi imigran sejak sensus 1990. Meskipun persentase imigran di populasi Perancis tetap berada di atas rata-rata Uni Eropa yakni 4,4%, Perancis adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa dan negara OECD yang jumlah imigrannya telah mengalami penurunan dalam periode ini.

Bagian dari penurunan tersebut adalah karena naturalisasi sekitar 60.000 imigran setiap tahunnya, dan sebagian disebabkan oleh kematian. Namun, harus ditekankan bahwa seperempat dari imigran yang telah memasuki Prancis sejak tahun 1990 telah meninggalkan negara tersebut (220.000 dari 850.000 entri sejak 1990). Tingginya tingkat keberangkatan ini sebagian disebabkan oleh lemahnya iklim ekonomi di Prancis selama sebagian besar periode ini.

D. Hukum Imigrasi Tahun 1998

Pada tahun 1997, seorang ilmuwan politik terkemuka bernama Patrick Weil dipilih oleh Perdana Menteri Lionel Jospin untuk menulis laporan berjudul *L'immigration et la nationalité*, dan menjadi dasar dari undang-undang imigrasi yang baru yang diadopsi pada tahun 1998. Di dalam pendapatnya, Weil mengatakan bahwa hukum Pasqua pada tahun 1993 menjadi penghalang bagi mahasiswa asing dan profesional muda untuk menetap di Prancis. Hal ini menyebabkan negara Prancis kehilangan sumber daya manusia merongrong kepentingan nasionalnya dalam persaingan global untuk pikiran yang paling cerdas.

Kebijakan yang direkomendasikan oleh Weil sebenarnya terinspirasi oleh model yang diterapkan oleh Amerika Serikat, khususnya ketentuan penerapan visa yang sangat terampil. Undang-undang mengenai imigrasi tahun 1998 ini menciptakan adanya status khusus untuk para ilmuwan dan cendekiawan. Langkah-langkah lebih lanjut yang diterapkan pada tahun itu ditujukan untuk mempermudah masuknya orang-orang profesional dengan keterampilan yang tinggi. Terlepas dari kebijakan tersebut, Prancis masih tertinggal dari Amerika Serikat, Jerman dan Inggris dalam usahanya mencari tenaga kerja.

Tiga tahun setelah diterapkannya undang-undang tentang imigrasi tahun 1998, politik sayap kiri dan sayap kanan Prancis tampak telah setuju dengan kebijakan untuk tidak menolak imigrasi, setidaknya di tingkat nasional.

Konsensus yang baru mengistimewakan fungsi restriktif kebijakan imigrasi, dan rezime Uni Eropa yang masih berkembang dalam menangani imigrasi dan suaka pun menegosiasikannya dengan birokrat kementerian dalam negeri dan birokrasi peradilan nasional, ditandai oleh adanya kebijakan pembatasan secara umum.

Kendati demikian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh episode Laut Timur, instrumen kebijakan selayaknya visa dan sanksi *carrier* yang berusaha mencegah datangnya imigran yang tidak diinginkan ke perbatasan Eropa tidak mampu menghentikan kedatangan mereka. Para imigran justru mengkriminalisasikan proses migrasi tersebut dan meningkatkan permintaan akan penyelundupan jaringan dan harta benda mereka. Uni Eropa dan Perancis dewasa ini menyaksikan betapa buruknya dampak dari isu ini sebagaimana yang dialami Amerika Serikat di perbatasan Meksiko, di mana pembatasan-pembatasan baru di beberapa negara bagian hanya akan mengalihkan arus ke daerah lainnya, dan meningkatkan harga tiket masuk illegal tersebut.

E. Profil Emmanuel Macron

Gambar 3.1: Emmanuel Macron



Sumber: <https://www.thesun.co.uk/news/3509613/whos-hotter-emmanuel-macron-or-justin-trudeau-sexiest-world-leader/>

Berdasarkan pada data yang penulis kutip dari House of Commons Library, Emmanuel Macron, pemimpin dari Partai *En Marche!* yang ia dirikan April 2016 lalu, berusia 39 tahun, merupakan Calon Presiden termuda dalam sejarah Perancis. Macron belum pernah menjadi Presiden terpilih sebelumnya.

Macron lahir di Amiens, letaknya di sisi timur laut Perancis, anak laki-laki dari Bapak dan Ibu yang keduanya merupakan seorang dokter. Ia mempelajari filsafat di Universitas Nanterre Paris. Kemudian melanjutkan studi masternya di *Public Affairs*, dan lulus dari *École nationale d'administration (ENA)* pada tahun 2004. ENA sendiri merupakan rumah kliring pusat bagi pemimpin-pemimpin di Perancis, mengingat besarnya jumlah dari politisi senior dan pegawai negeri sipil yang lulus dari institusi tersebut.

Macron melaksanakan tugas pertamanya sebagai aparatur negara di tahun 2012, setelah diamanatkan oleh Presiden Hollande sebagai wakil sekretaris-jenderal di

Istana Elysee, Kantor Resmi Kepresidenan Perancis. Macron disebut sebagai *sherpa* atau perwakilan pribadi di setiap forum internasional terkait Krisis *Eurozone*. Namun, Macron keluar dari jabatannya pada tahun 2014, setelah mengalami kejenuhan dalam menangani terbatasnya niat Hollande dalam reformasi ekonomi Perancis.

Setelah berhenti dari jabatannya, Macron dipersuasi oleh Presiden Hollande untuk bergabung di dalam kabinetnya sebagai Menteri Perekonomian, Industri dan Urusan Digital, bekerja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Manuel Valls. Sebagai menteri ia pun mempersiapkan serangkaian reformasi yang ramah bisnis, hal ini sering disebut sebagai “Hukum Macron”. Namun, khawatir akan ditolaknya reformasi tersebut oleh parlemen, pemerintah saat itu memutuskan untuk menggunakan kekuatan kontroversial dan jarang digunakan dari dekrit demi melewati jalur legislatif tersebut.

Frustrasi terhadap hambatan tersebut, dan ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Valls, mendorong Macron untuk menciptakan gerakan politiknya sendiri yang dinamai En Marche! (EM) pada bulan April 2016. Macron dalam gerakannya tersebut, menerima cercaan dari Presiden Hollande, namun hal itu tidak menyebabkannya dipecat. Ia justru memutuskan untuk keluar dari pemerintahan pada bulan Agustus 2016 dikarenakan pencalonan dirinya sebagai Presiden dari Partai yang baru saja ia dirikan.

Emmanuel Macron dulunya adalah anggota dari Partai Sosialis, ia bergabung dari tahun 2006 hingga 2009, akan tetapi ia tidak melanjutkan keanggotaannya, dan mendeklarasikan secara publik: “Saya bukan Sosialis”.

Menurut BBC, En Marche telah mendaftarkan 200.000 anggotanya. Setiap anggota dari partai tersebut tidak harus membayar apapun dan tidak menerima tuntutan untuk meninggalkan keanggotaannya di Partai Politik lain.

Dalam kampanyenya, Macron memaparkan berbagai kebijakannya apabila terpilih sebagai Presiden Perancis, yakni:

1. Ekonomi dan Investasi Publik
 - a. Memotong pajak korporasi dari 33 menjadi 25 persen
 - b. Memotong tingkat pengangguran menjadi 7% (10% pada saat itu)
 - c. Menetapkan keringanan pajak gaji permanen bagi pekerja dengan gaji rendah dan membebaskan pekerja dengan gaji rendah dari pungutan kesejahteraan sosial tertentu.
 - d. Mempertahankan kebijakan jam wajib kerja 35 jam per minggu namun memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk bernegosiasi, sebagaimana penghapusan potongan keamanan sosial dari upah lembur.
 - e. Membiayai rencana investasi publik sebesar €50 Miliar dalam 5 tahun untuk pelatihan kerja, pembaharuan energi, modernisasi transportasi, dan infrastruktur lokal, pembiayaan sektor tani, dan modernisasi serta komputerisasi dalam administrasi publik.
2. Penghematan dalam anggaran belanja.
 - a. Total target dari penghematan dalam belanja adalah €60 Miliar, meskipun €10 miliar dari penghematan tersebut didasarkan pada pengurangan penghematan biaya pengangguran yang dihasilkan oleh penurunan tingkat pengangguran 7%.
 - b. €25 miliar lainnya diprediksi berasal dari modernisasi pelayanan publik. Sebagian dari ini akan berasal dari pengurangan 120.000 pegawai negeri, yang 50.000-nya akan berasal dari pegawai negeri pusat.

- c. € 10 miliar akan berasal dari pemotongan belanja pemerintah daerah, termasuk pengurangan 70.per kepala.
3. Keamanan, hukum dan penegakannya.
 - a. Membangun 15.000 rumah tahanan tambahan.
 - b. Memperkerjakan 10.000 polisi tambahan dan *gendarme*, dan memperkuat badan intelijen untuk melawan tindak terorisme.
 - c. membuat kantor baru yang mengawasi operasi intelijen, keamanan dan anti-teroris yang melapor langsung kepada Presiden.
 - d. Memperkenalkan denda *on-the-spot* untuk penggunaan narkoba dan perintah larangan untuk menjauhkan pemimpin geng dari lingkungan sekitar.
 - e. Menciptakan 5.000 pasukan perbatasan Uni Eropa yang kuat untuk melindungi perbatasan terluar Uni Eropa.
4. Budaya dan Pendidikan
 - a. Melarang penggunaan ponsel di sekolah untuk yang berusia di bawah 15 tahun.
 - b. menurunkan jumlah murid sekolah dasar awal menjadi 12 per kelas di 12.000 zona berpenghasilan rendah, dengan guru diberi bonus €3.000 setahun untuk bekerja di area tersebut.
 - c. Memberikan remaja berusia 18 tahun sebesar €500 sebagai *culture pass* untuk dihabiskan menonton film di bioskop dan tiket konser.
5. Program Kesehatan dan Sosial
 - a. Membelanjakan €5 miliar di sektor kesehatan, termasuk mengembalikan biayaacamata, gigi palsu dan alat bantu dengar.
 - b. Macron juga mempercayai bahwa penghematan dapat ditemukan dalam biaya belanja kesehatan umum apabila dilakukan dengan efisien.
6. Imigrasi/Integrasi

- a. Secara tegas menerapkan kebijakan sekuler Perancis dalam kehidupan sehari-hari akan tetapi menghapus larangan penggunaan kerudung bagi umat muslim di lingkungan kampus.
 - b. Menutup tempat peribadahan yang menyebarkan nilai terorisme.
 - c. Memproses permohonan suaka dalam kurun waktu 6 bulan, dan membuat aturan mempelajari Perancis sebagai syarat utama untuk memperoleh kewarganegaraan.
7. Kepemimpinan dalam Pemerintahan
- a. Mengurangi jumlah legislator hingga sepertiga baik di Senat maupun di Majelis Nasional.
 - b. Mengurangi sekurang-kurangnya seperempat dari otoritas lokal tingkat provinsi atau *departements*.
 - c. Melarang bagi legislator untuk memperkerjakan anggota keluarganya sendiri.
 - d. Menahan siapapun yang memiliki catatan kriminal untuk bekerja di kantor.
 - e. Melarang adanya kegiatan konsultasi bagi orang-orang yang terpilih memegang jabatan.
8. Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri
- a. Membelanjakan 2 persen dari GDP untuk pertahanan. Memperbarui pesawat pengisian bahan bakar militer, dan memodernisasi kekuatan lapis baja tentara dan armada permukaan angkatan laut. Belanja militer Prancis yang direncanakan untuk tahun 2017 adalah € 32,7 miliar (£ 27,6 miliar), yang merupakan 1,77 persen dari PDB.
 - b. Buat dengan Jerman dan negara-negara lain yang bersedia menjadi Asosiasi Pertahanan Eropa, dan Dana Pertahanan Eropa yang akan membiayai peralatan militer seperti pesawat tak berawak, dan juga Markas Pertahanan Eropa permanen.
9. Eropa
- a. memperkenalkan '*Buy European Act*' yang mengharuskan perusahaan untuk menemukan

- setidaknya setengah dari produksinya di Eropa sebelum mereka dapat mengakses kontrak pengadaan publik.
- b. Memperluas skema Erasmus kepada program magang
 - c. Membuat satu pasar digital dan satu pasar energi di Eropa.
 - d. Memperkenalkan 'konvensi warga' di seluruh Eropa untuk 'mengembalikan makna pada proyek politik Eropa'.

F. Emmanuel Macron pada Pemilihan Presiden Perancis tahun 2017

Emmanuel Macron dilantik sebagai Presiden baru Perancis di Istana Élysée, Minggu (14/5/2017) periode 2017 – 2022. Semenjak Perang Dunia II, untuk pertama kalinya, presiden terpilih bukan kandidat yang berasal dari dua partai utama yaitu Sosialis dan Republik. Macron mendirikan partai En Marche dengan tujuan untuk menyatukan aliran kiri dan kanan dengan visi yang pro-Eropa, pro-integrasi, dan pro keterbukaan. Dalam pemilihan Presiden ini, Macron berhasil mengalahkan lawannya yaitu Marine Le Pen yang merupakan tokoh ekstremis kanan, anti-Eropa, dan anti-imigran.⁵¹

Kemenangan Emmanuel Macron di Pemilu Prancis sejatinya merupakan kemenangan yang cukup menarik perhatian, baik dari kalangan media maupun akademisi. Pasalnya setahun sebelumnya, Macron dianggap bukan siapa-siapa. Meski sempat berada di kabinet Presiden Hollande, namun ia kurang populer. Bahkan tingkat elektabilitasnya tahun lalu masih di bawah pesaingnya, Marine Le Pen.⁵² Sebagaimana dikutip dari laman *BBC.com*,

⁵¹Pujayanti, *Loc. Cit.*

⁵²Natalyn, Ezra. *Emmanuel Macron Menang Pemilu, Keberuntungan atau Strategi?*. Viva.co.id. 2017. Diakses 4 April 2018. (Dapat diakses

Macron yang diusung oleh partai sayap tengah yang kurang populer ternyata bisa menempatkan diri menonjol dengan mendirikan gerakan En Marche pada bulan April 2016 lalu. Dengan mengusung gerakan ini, Macron mundur dari Kabinet Francois Hollande dari jabatannya sebagai Menteri Perekonomian.

Dengan wadah En Marche yang artinya bergerak, Macron terinspirasi oleh teknik kampanye mantan Presiden AS, Barack Obama, pada Pemilu 2008 silam. En Marche memiliki aktivis dan relawan yang secara *door to door* memperkenalkan figur Macron. Tidak hanya menyebarkan selebaran, para relawan En Marche juga melakukan wawancara dengan warga Prancis terkait kebutuhan dan keinginan mereka dari pemerintah pada saat ini. Hasil dari wawancara tersebut kemudian masuk ke dalam basis data Macron untuk menentukan program-programnya pada saat kampanye tahun 2017.

"Mereka bahkan mengirim para relawan yang mendatangi paling tidak 300 ribu rumah," kata Jurnalis Prancis, Emily Schultheis.

Selain kegigihannya bersama En Marche tersebut, Macron pada saat berhadapan langsung dengan Marine Le Pen dianggap memiliki pesan yang lebih positif dan ramah kepada setiap kalangan. Macron juga menempatkan diri bukan sekadar representasi elite sebagaimana yang diidentikkan Le Pen. Itu sebabnya Macron lantas dianggap lebih membumi dan berjiwa muda sekalipun dia berasal dari kalangan pebisnis. Gaya kampanye Macron juga lebih kekinian dan santai dengan adanya musik-musik pop yang bisa menarik perhatian warga berbagai latar belakang.

pada: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/913094-emmanuel-macron-menang-pemilu-keberuntungan-atau-strategi>)

Sementara Le Pen dinilai terlalu serius dengan gaya kampanye yang tak berbeda dari calon-calon sebelumnya.

Posisi Macron yang juga akhirnya menarik perhatian rakyatnya adalah keberanian untuk memilih posisi dan ide yang sama sekali bertolak belakang dengan Le Pen. Diketahui bahwa Le Pen adalah politikus partai sayap kanan yang konservatif dan tidak menyukai adanya integrasi Uni Eropa. Le Pen juga tak mendukung kebijakan terhadap imigran Prancis selama ini yang kebanyakan beragama Islam. Namun Macron tak ragu untuk mendukung Prancis tetap berada di Uni Eropa. Dalam kampanyenya, Macron menyampaikan bahwa ia akan menjadikan Prancis semakin globalis, artinya moderat dalam kebijakan politik internasional, termasuk tetap menerima imigran.⁵³

Membahas tentang kampanye yang memiliki pengaruh luar biasa sebagaimana yang dialami oleh Macron sudah tentu akan membuat kita mempertanyakan tentang mengapa, bagaimana, dan strategi apa yang digunakan oleh seorang aktor politik untuk mengarahkan perilaku pemilih menjadi pendukungnya dalam proses *voting* di suatu pemilihan umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan konseptual yakni Strategi Kampanye Aktor Politik yang digagas oleh Kriesi, Bernhard, dan Hanggli. Melalui pendekatan yang dirangkai dalam konsep tersebut, penulis meyakini bahwa strategi kampanye aktor politik memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan faktor-faktor lain dalam suatu proses kampanye. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk memberikan penjabaran lebih komprehensif terkait kemenangan Emmanuel Macron sebagai tokoh yang pro-imigran di tengah maraknya isu anti-imigran yang sedang terjadi di Prancis pada bab selanjutnya.

⁵³Natalyn, *Ibid.*